

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kebutuhan dasar manusia, mengingat kualitas dan kuantitas manusia ditentukan oleh pangan. Dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, prasyarat utama dalam pangan haruslah memenuhi dari segi kecukupan, bermutu, aman, dan bergizi. Maka dari itu, pemenuhan akan pangan menjadi bentuk hak asasi manusia dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa.

Sebagai bentuk hak asasi manusia dan kebutuhan dasar manusia, pangan memiliki peran dan arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Pangan jika dihadapkan dalam kondisi dimana ketersediaannya tidak berbanding sama atau lebih rendah daripada kebutuhannya maka tentu akan memicu masalah pada ketidakstabilan berbagai sektor, baik itu ekonomi sosial, maupun ekonomi.

Masalah pangan di Indonesia pun juga dipicu oleh bencana alam, mengingat Indonesia merupakan negara yang rentan akan bencana hidrometeorologi. Sebagaimana dalam infografis yang dipublikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Indonesia, bahwa total bencana yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 3.544 kejadian, dimana bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi, yang mencakup bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan lain sebagainya.

Terlebih tantangan baru yang dihadapi dengan adanya perubahan iklim, seperti perubahan pola curah hujan, suhu yang lebih tinggi, kenaikan permukaan air laut, turut memberikan dampak kepada sektor pertanian. Banyak petani di daerah-daerah yang sulit memulai musim tanam imbas dari perubahan musim hujan sehingga mempengaruhi masa panen mereka dan bahkan gagal panen pun juga semakin tidak terhindarkan. Maka demikian, peran negara dalam ketahanan pangan sangat krusial. Negara memainkan peran utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung

produksi pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam melindungi dan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi seluruh penduduknya.

Negara wajib membangun ketersediaan, keterjangkuan konsumsi pangan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia hingga ke tingkat nasional sampai ke masing-masing individu. Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri untuk mencapai ketahanan pangan yang memadai, mengingat jumlah penduduk, sumber daya alam, dan keanekaragaman sumber pangan yang sangat besar.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara wajib menjalankan kedaulatan pangan dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rakyat. Kewajiban ini meliputi dari ketersediaan, keterjangkuan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Termaktub pula dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dijelaskan pentingnya penyelenggaraan pangan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang mengedepankan dampak kebermanfaatannya secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan.

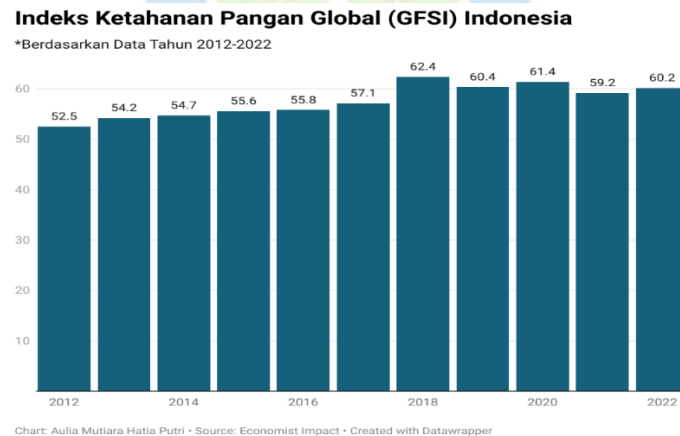
UU tersebut menjelaskan definisi Ketahanan Pangan sebagai kondisi dimana negara sampai perindividu telah terpenuhi akan pangannya, yang hal tersebut terlihat dari tercukupinya persediaan pangan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya pangan juga harus bergizi, merata, dan dapat dijangkau masyarakat dengan tidak berbenturan dengan nilai-nilai agama, budaya, ataupun keyakinan, agar masyarakat dapat sehat, aktif, dan produktif.

Peraturan Pemerintah (PP) 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi berfokus dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat Indonesia melalui pengembangan produksi pangan, distribusi pangan yang merata, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas. PP ini pun mengatur pengembangan sistem informasi ketahanan pangan dan gizi serta

pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap ketahanan pangan dan gizi. Penjelasan lainnya mengenai ketahanan pangan, dimana Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan gambaran sebagai kemudahan akses setiap waktu pada tiap-tiap rumah tangga maupun perorangan dalam memperoleh pangan dalam mewujudkan kehidupan yang sehat.

Berdasarkan kekuatan ketahanan pangan, dilihat dari data *Global Food Security Index (GFSI)*, dalam indeks ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 menyentuh di angka 60,2, naik sebesar 1,69% dibanding tahun 2021 yang menempatkan ketahanan pangan di Indonesia berada di peringkat 69 dari 113 negara. Meskipun demikian, adanya peningkatan tersebut masih belum menyentuh angka rata-rata ketahanan pangan global yang indeksnya 62,2 dan indeks rata-rata Asia Pasifik dengan indeks 63,4. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah.

**Gambar 1. 1 Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) Indonesia**



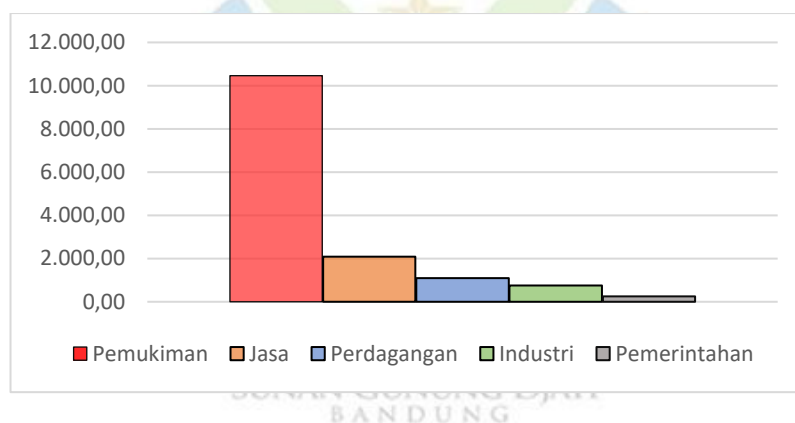
Sumber: *Economist Impact 2022*

Kemudian jika melihat indeks ketahanan pangan (IKP) dalam skala kabupaten/kota yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional pada tahun 2022, berdasarkan peringkat IKP, lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (91,82), Balikpapan (89,47), Salatiga (87,39), Semarang (87,13), dan Bekasi (86,79). Adapun Kota Bandung menempati urutan ke-34 dengan memperoleh nilai

(80, 23) sehingga masih tergolong baik, jika dilihat nilai minimum IKP untuk kota yang sebesar (70,64).

Kota Bandung merupakan kota metropolitan di Jawa Barat. Kota Bandung tumbuh menjadi pusat perdangan lokal dan regional, pusat pendidikan, kota pariwisata, maupun pusat industri. Dengan pesatnya perkembangan suatu kota tidak luput juga dalam memberikan dampak terhadap semakin terbatasnya ruang lahan hijau, khususnya lahan-lahan pertanian. Banyak dari lahan-lahan pertanian dialih fungsikan menjadi sektor lain, baik untuk pemukiman, perdagangan atau industri, serta pusat-pusat aktivitas masyarakat lainnya. Maka, dengan semakin banyak lahan yang di alih fungsikan tentu membuat semakin sempitnya ruang untuk bercocok tanam.

**Gambar 1. 2 Tingkat Penggunaan Lahan di Kota Bandung Tahun 2020**



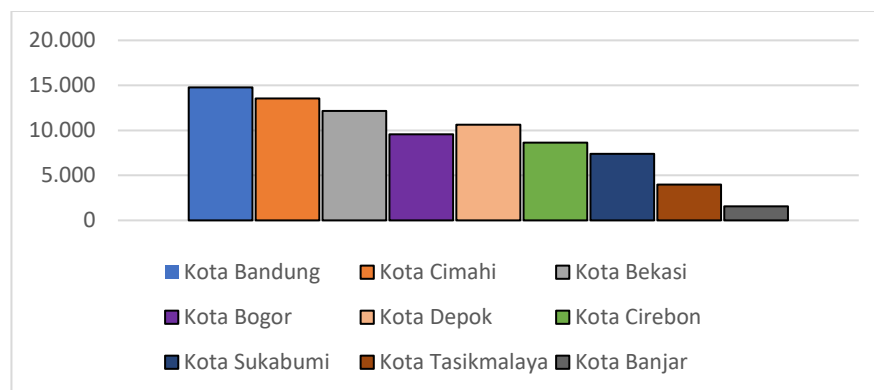
Sumber: Survei Data Basis Pembangunan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kota Bandung sebagian besar digunakan untuk pemukiman dengan luas sebesar 10.460,5 Ha. Adapun sisanya digunakan untuk sektor lain seperti jasa, perdagangan, industri, pemerintahan, dan lain-lain. Sementara itu, hanya 7,9 % dari luas lahan Kota Bandung yang digunakan sebagai kawasan lindung.

Besarnya penggunaan lahan untuk pemukiman di Kota Bandung merupakan sebab dari banyaknya jumlah penduduk yang menetap. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, tercatat jumlah penduduk dari hasil sensus pada tahun 2021 sebanyak 2.527.854, dimana angka tersebut tumbuh 0,48

persen dari tahun sebelumnya. Secara luas, Kota Bandung mempunyai wilayah seluas 166, 59 km<sup>2</sup>. Sehingga dilihat dari kepadatan penduduk di Kota Bandung sebesar 14,776 ribu jiwa per km<sup>2</sup>, yang hal tersebut menjadikan Kota Bandung sebagai kota terpadat di Jawa Barat, sebagaimana yang terlihat dari grafik di bawah.

**Gambar 1. 3 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Dengan demikian, isu ketahanan pangan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang sangat besar dan jumlah lahan pertanian yang menyusut. Ketahanan pangan mungkin tidak akan menjadi masalah besar jika pertumbuhan penduduk lebih lambat dari pertumbuhan pangan, namun jika sebaliknya, kelaparan akan menjadi ancaman. Sehingga permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang positif (Chaireni, Agustanto, Wahyu, & Nainggolan, 2020).

Sehingga menjadi suatu kewajiban tugas pemerintah untuk mengatur melalui undang-undang yang mendukung ketahanan pangan dengan kebutuhan untuk mencegah kekurangan pangan, mencapai ketahanan pangan, dan memastikan ketersediaan logistik pangan. Dalam memastikan bahwa semua kebutuhan pangan terpenuhi, terutama bagi masyarakat, baik melalui maka perlu instrument undang-undang kebijakan pangan yang mengikat maupun melalui peraturan daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Pemerintah Kota

Bandung melalui peraturan tersebut menyikapi terkait ketersediaan pangan di Kota Bandung yang terus berfluktuasi yang salah satunya karena akibat dari peningkatan jumlah penduduk di Kota Bandung. Sehingga menjadi suatu strategi tersendiri di Kota Bandung dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.

Kemudian melalui Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 520/.E.086 – DISPANGTAN Tentang Pelaksanaan Kegiatan *Urban Farming* pada tahun 2020, Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Bandung dalam upaya menguatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan dibentuklah sebuah program *urban farming* yang dinamakan “Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis).

Buruan SAE merupakan sebuah program yang menjadi bagian dari program pertanian yang ada di Kota Bandung. Program ini fokus dalam memberdayakan masyarakat untuk dapat mandiri dalam memproduksi makanan melalui kegiatan pertanian atau perkebunan melalui pemanfaatan lahan kosong atau perkarangan rumahnya. Selain pertanian, program ini juga memadukan dengan sektor ternak dan ikan dalam satu kesatuan. Sehingga, masyarakat pun dapat mengonsumsi makanan yang lebih alami, sehat, dan ekonomis serta menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik.

Program ini tersebar di 151 kelurahan di Kota Bandung, menasar pada skala keluarga maupun komunitas dalam penerapannya. Terhitung saat ini, telah terbentuk sebanyak 475 kelompok Buruan SAE yang tersebar, misalnya kelompok Gending Mas di Pasir Jati, Pemuda Mandiri di Sukawarna, Tamansari Sae di Taman Sari, Tani Sajajar di Batununggal, Mandiri Cipwet di Cipadung Wetan, dan berbagai kelompok lainnya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung selaku *leading sector* dalam program Buruan SAE, mengencarkan program ini dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat Kota Bandung. DKPP juga menggaet media massa sebagai bagian dari stakeholder yang

turut andil dalam peluncuran dan penyebarluasan program tersebut, seperti Cosmo Radiovisual, Inews Bandung, Kompas TV, Iradio Bandung, dan Galamedia.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses difusi program Buruan SAE telah dilakukan secara baik oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Hal tersebut dilihat berdasarkan berbagai elemen difusi inovasi. Dalam elemen Inovasi (*innovation*), program Buruan SAE menjadi program yang membawa keunggulan kepada masyarakat karena program tersebut berkonsep *integrated urban farming*. Sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai macam sumber pangan secara mandiri walaupun hanya memanfaatkan perkarangan rumah atau lahan sempit. Melalui program ini juga telah memberikan manfaat terhadap perkonomian, lingkungan, maupun kesehatan masyarakat.

**Tabel 1.1 Keunggulan Program Buruan SAE**

No.	Keunggulan Program Buruan SAE
1.	<i>Integrated urban farming</i> di mana terintegrasi dengan 7 sektor yang tidak hanya sektor pertanian
2.	Dapat dilakukan di lahan terbatas atau perkarangan rumah dengan sistem pertanian modern
3.	Meningkatkan Ketahanan pangan dan kemandirian pangan masyarakat dengan akses yang lebih mudah
4.	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan jual beli hasil panen
5.	Membantu menurunkan angka stunting dengan menyediakan pangan yang sehat dan bergizi
6.	Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dilakukan dengan pengolahan sampah dan pengurangan polusi melalui aktivitas program

Saluran komunikasi (*communication channel*), adanya peran aktif DKPP Kota Bandung dalam menyebarluaskan program Buruan SAE, baik secara komunikasi interpersonal dan media massa. Komunikasi interpersonal dilakukan melalui



sosialisasi secara langsung dari tingkat kecamatan maupun kelurahan. DKPP juga menugaskan pendamping dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam memberikan edukasi maupun demonstrasi kegiatan program ke masyarakat. Selain itu, adanya pelibatan berbagai media sebagai bagian stakeholder dalam menyebarluaskan informasi terkait Buruan SAE.

Jangka waktu (*time*), program Buruan SAE pada tahun 2024 secara jumlah kelompok kegiatan telah mencapai sebanyak 475 kelompok dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 150 kelompok. Sehingga secara peningkatan cukup signifikan. Sistem sosial (*social system*), Adanya dukungan pemimpin (*opinion leader*) di tingkat kecamatan dan Rukun Warga (RW) maupun keterlibatan TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan) dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan program Buruan SAE kepada masyarakat sekitar.

Sehingga penelitian ini mengangkat isu positif di dalam aspek difusi inovasi, sebagaimana Sekaran dan Bougie (2016: 33) dalam bukunya "*Research Methods for Business*" menyatakan bahwa masalah tidak selalu mengangkat isu-isu yang bersifat negatif. Sebaliknya, masalah juga mengindikasikan adanya ketertarikan terhadap suatu isu di mana menemukan jawaban yang tepat mungkin membantu memberikan dampak yang lebih baik pada situasi yang sudah ada. Sehingga penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, potensi pertumbuhan, dan inovasi yang dapat diambil oleh suatu bisnis. Seperti halnya penelitian tentang strategi dalam meningkatkan keberlanjutan, inovasi suatu produk, dan lain sebagainya.

Maka dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian dengan mengungkap judul "**Difusi Inovasi Program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Bandung**". Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk memahami dan mendalami lebih lanjut terkait praktik-praktik positif yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam mendifusikan program Buruan SAE kepada



Masyarakat Kota Bandung, serta dampaknya terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kota Bandung.

### **B. Identifikasi Masalah**

Dilihat dari latar belakang permasalahan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi terkait masalah yang termuat dalam penelitian, antara lain:

1. Adanya keunggulan dan kemudahan dalam mengadopsi program Buruan SAE yang berkonsep *integrated urban farming* oleh masyarakat Kota Bandung.
2. Adanya pemanfaatan media massa dan media sosial yang didukung oleh stakeholder yang terlibat dalam menyebarkan pemahaman program Buruan SAE.
3. Adanya pertumbuhan titik kelompok Buruan SAE yang cukup signifikan di Kota Bandung.
4. Adanya interaksi dan dukungan yang dilakukan Kecamatan hingga RW dalam memantau dan mengatasi masalah yang berbeda di setiap lokasi pelaksanaan program.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat rumusan masalah yang penulis paparkan, antara lain:

1. Bagaimana inovasi program Buruan SAE dapat sesuai dilaksanakan di Kota Bandung?
2. Bagaimana saluran komunikasi berpengaruh dalam menyebarkan informasi terkait program Buruan SAE?
3. Bagaimana jangka waktu berpengaruh dalam tingkat penerimaan masyarakat Kota Bandung terhadap program Buruan SAE?
4. Bagaimana sistem sosial dapat mempengaruhi adopsi dari program Buruan SAE?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan, antara lain:

1. Untuk mengetahui kesesuaian program Buruan SAE dalam pelaksanaannya di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui peran saluran komunikasi dalam menyebarkan informasi terkait program Buruan SAE
3. Untuk mengetahui tingkat perubahan adopsi program Buruan SAE dalam waktu ke waktu
4. Untuk mengetahui seberapa besar sistem sosial dapat mempengaruhi adopsi dari program Buruan SAE

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menimbang aspek kebermanfaatan ataupun kontribusi, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktik. Hal tersebut dapat jibarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya referensi seputar program Buruan SAE berdasarkan pada aspek difusi inovasi, yang melihat bagaimana proses pihak pengelola program (Dinas Pangan dan Pertanian) mengkomunikasikan inovasinya untuk diadopsi oleh para adopter (masyarakat) di Kota Bandung.

2. Manfaat praktik

- a) Penelitian ini diharapkan mampu sebagai bentuk pembelajaran tersendiri bagi peneliti dalam memahami konsep difusi inovasi dan juga bagaimana pemerintah Kota Bandung berupaya mengatasi masalah pangan melalui program Buruan SAE.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu sebagai masukan bagi Dinas Pangan dan Pertanian dalam meningkatkan optimalisasi program Buruan SAE sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Kota Bandung.

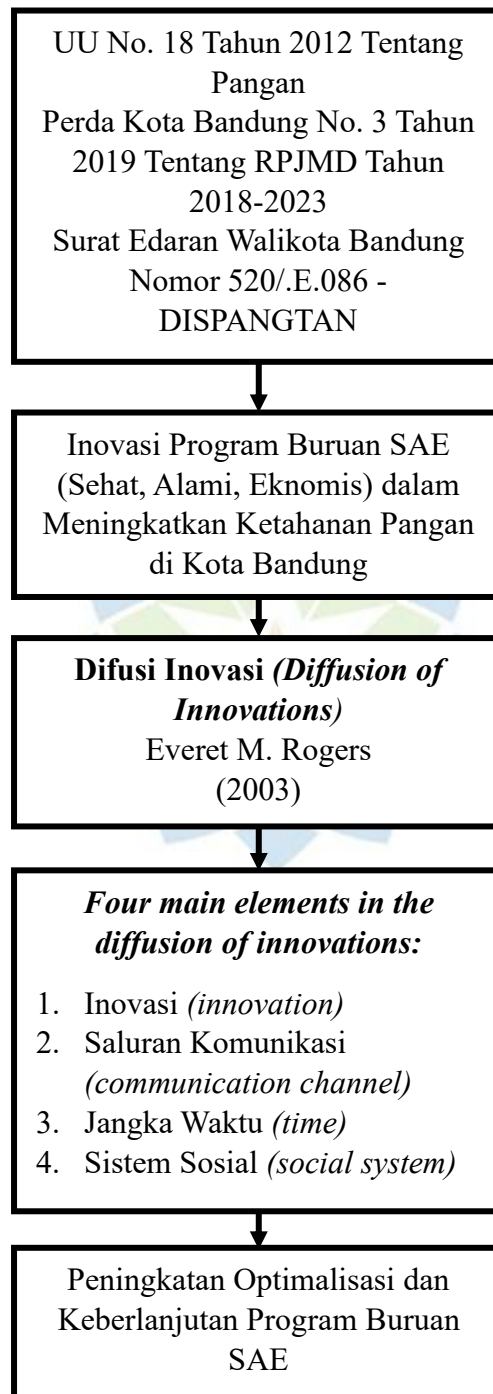
## F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian mempunyai fungsi sebagai gambaran ataupun alur yang menghubungkan bagaimana konsep, teori, dan rumusan masalah saling terhubung. Penelitian ini mengkaji masalah menggunakan teori difusi inovasi. Difusi inovasi merupakan teori yang dipelopori dan dikembangkan oleh Everett M. Rogers yang ditulis dalam bukunya "*Difussion of Innovation*" pada tahun 1962. Sehingga dipilihnya teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers dalam penelitian ini karena everett M. Rogers yang mengembangkan paling awal teori difusi inovasi, serta teori ini dianggap paling sesuai dengan objek penelitian yang dikaji.

Difusi inovasi adalah proses mengkomunikasikan sebuah inovasi melalui beberapa saluran komunikasi dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Penelitian ini akan menguraikan proses dari difusi inovasi dalam program Buruan SAE, dimana keberhasilan suatu inovasi dapat diadopsi oleh masyarakat dengan melihat empat elemen, diantaranya:

- a) Inovasi, merujuk pada sifat atau karakteristik inovasi itu sendiri. Inovasi dapat mencakup berbagai hal, seperti ide, produk, atau praktik baru yang dianggap lebih baik dari yang sudah ada.
- b) Saluran komunikasi, adalah cara di mana informasi tentang inovasi disampaikan kepada anggota masyarakat.
- c) Jangka waktu, merujuk pada waktu yang diperlukan bagi inovasi untuk menyebar melalui masyarakat.
- d) Sistem sosial, merujuk pada struktur dan dinamika masyarakat tempat inovasi diadopsi. Faktor-faktor seperti norma sosial, nilai-nilai, struktur sosial, dan kebijakan dapat mempengaruhi sejauh mana inovasi diterima.

Sehingga berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, tujuan dilaksanakannya penelitian, serta kajian teori yang diuraikan skema kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana gambar 1.4 berikut:

**Gambar 1.4 Kerangka Berpikir**

Sumber: Diolah peneliti